



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : H. MUHYIDDIN
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 477824

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.400.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/117 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/91 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 29 m2/29 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 103 m2/103 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 111 m2/111 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 400.000.000

1. MOTOR, BENELLI BS 250 PE M/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEF Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 265.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 80.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 47.258.185

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.927.258.185



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.927.258.185

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.